

LAPORAN KINERJA

SEKRETARITAT DJEN PERIKANAN TANGKAP

TAHUN 2020



DITJEN PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2020

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Sebagai salah satu Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, berupaya memenuhi ketentuan PerPres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejak tahun 2013 dan sejalan dengan proses reformasi birokrasi, pengelolaan kinerja di KKP telah bertransformasi melalui metode penerapan Balanced Scorecard (BSC). Dengan BSC, seluruh unit-unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja.

Implikasi dari semua proses ini tentunya memang membutuhkan beberapa perubahan paradigma dalam penyusunan dan pengukuran kinerja. Proses transisi memang tidak mudah, tapi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap akan terus konsisten dalam mendukung upaya KKP berada dalam jalur Reformasi Birokrasi.

Semoga apa yang disajikan dalam LKJ Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap 2020 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 15 Januari 2021

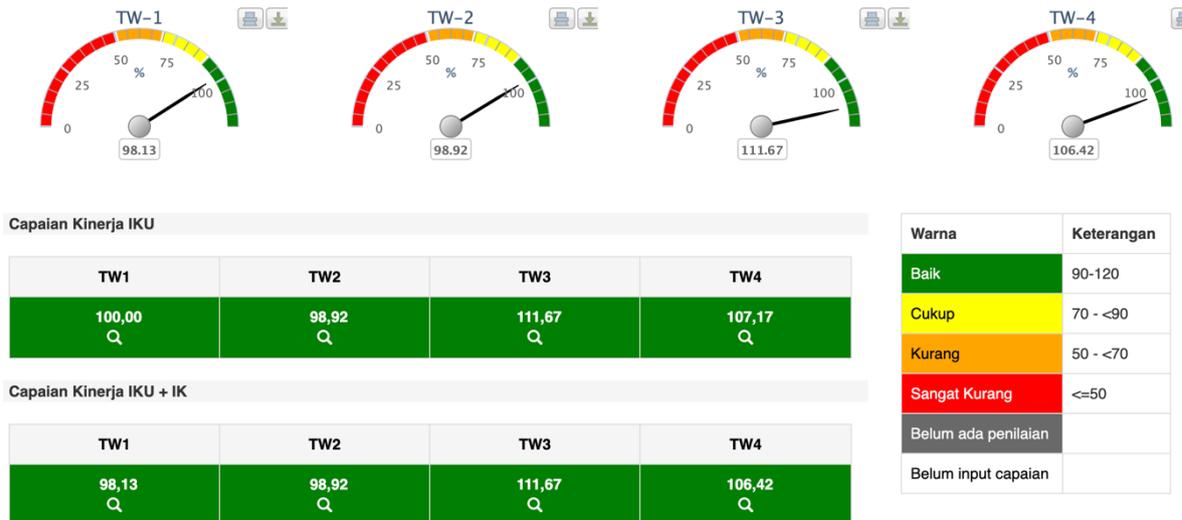
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



Yuliadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar 125.628.331.000 miliar dengan realialisasi anggaran sebesar Rp. 121.757.967.703 miliar atau mencapai 96,92 %. Secara kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap mendapatkan total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2020 sebesar 106,42 sebagaimana *dashboard* kinerjanya:



Hal ini didukung oleh pencapaian 9 IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020, yaitu:

1. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
2. Persentase unit Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)
4. Nilai IKPA Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
5. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks)
6. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangka Tahun 2019 (persen)
7. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
8. Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
9. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

DAFTAR ISI

| URAIAN | | HALAMAN |
|---------------------|---|-----------|
| COVER | | 1 |
| KATA PENGANTAR | | 2 |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | | 3 |
| DAFTAR ISI | | 4 |
| DAFTAR TABEL | | 5 |
| DAFTAR GAMBAR | | 6 |
| BAB I | PENDAHULUAN | 8 |
| 1.1 | Latar Belakang | 8 |
| 1.2 | Maksud dan Tujuan | 10 |
| 1.3 | Tugas dan Fungsi | 10 |
| 1.4 | Sistematika Penyajian Laporan | 10 |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA | 11 |
| 2.1 | Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2019 | 11 |
| 2.2 | Rencana Aksi Penetapan Kinerja | 12 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | 16 |
| 3.1 | Capaian Kinerja Organisasi | 16 |
| 3.2 | Analisis Capaian Kinerja | 18 |
| | 3.2.1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap | 18 |
| | 3.2.2. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Indeks) | 20 |
| | 3.2.3. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019 (persen) | 22 |
| | 3.2.4. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | 22 |
| | 3.2.5. Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP DJPT (persen) | 23 |
| | 3.2.6. Persentase unit Sekretariat DJPT yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen) | 24 |
| | 3.2.7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah dilengkapi dan disampaikan (persen) | 25 |
| | 3.2.8. Nilai IKPA Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap | 27 |
| | 3.2.9. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap | 28 |
| 3.3 | Kinerja Anggaran | 29 |
| 3.4 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 29 |
| BAB IV | PENUTUP | 30 |
| LAMPIRAN | | 31 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | URAIAN | HAL |
|--------------|--|------------|
| 1 | Indikator Kinerja dan Target Setditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 | 11 |
| 2 | Indikator Kinerja dan Rencana Aksi Setditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 | 12 |
| 3 | Capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 | 17 |
| 4 | Capaian IKU “Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020 | 19 |
| 5 | Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 | 19 |
| 6 | Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Indeks)” Tahun 2020 | 21 |
| 7 | Capaian IKU “Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019 (persen)” Tahun 2020 | 22 |
| 8 | Capaian IKU “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020 | 23 |
| 9 | Capaian IKU “Persentase pemenuan dokumen maturitas SPIP DJPT (persen)” Tahun 2020 | 24 |
| 10 | Capaian IKU “Persentase unit Sekretariat DJPT yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)” Tahun 2020 | 25 |
| 11 | Capaian IKU “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPT” Tahun 2020 | 26 |
| 12 | Capaian IKU “Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020 | 27 |
| 13 | Capaian IKU “Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020 | 28 |

DAFTAR GAMBAR

| GAMBAR | URAIAN | HAL |
|---------------|---|------------|
| 1 | Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 | 10 |
| 2 | Dashboard Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id | 16 |

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggirkan, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedaulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha

penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (control) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Selain perubahan terhadap fokus kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan, juga terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran dimana pada periode pemerintahan sebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan sebagian besar anggarannya pada pembangunan pelabuhan perikanan, namun pada periode pemerintahan saat ini difokuskan kepada pengadaan kapal perikanan. Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan perikanan tangkap kepada nelayan sehingga nelayan secara langsung dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan perikanan tangkap. Di sisi lain, fokus pelabuhan perikanan adalah pada upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah ada agar dapat difungsikan secara optimal. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2020 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang dan tetap dengan menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Terdapat 20 Indikator Kinerja Utama yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan membagi dalam 4 bagian pelaksanaan kinerja dilaksanakan oleh 4 Unit Bagian yaitu Bagian Program, Bagian Keuangan dan Umum, Bagian Hukum, Organisasi dan Kerjasama serta Bagian SDM Aparatur.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai.

Kemudian capaian kinerja tersebut dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan

melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

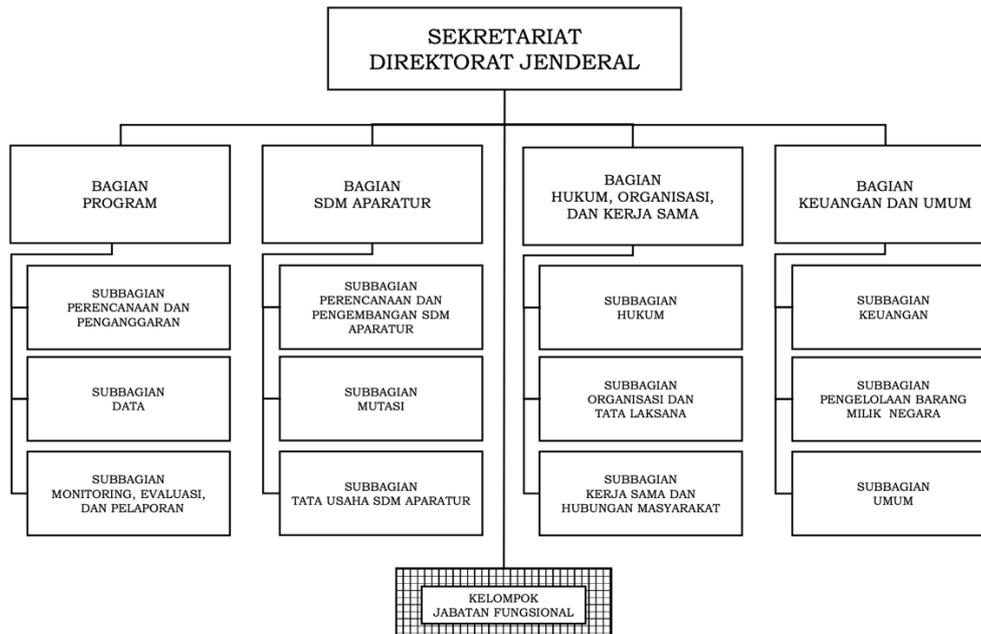
1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2020 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selama Tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. koordinasi kegiatan dan laporan kinerja serta pengelolaan data;
3. pelaksanaan urusan kepegawaian;
4. perumusan peraturan perundang-undangan, penataan dan pembinaan organisasi dan
5. tatalaksana, koordinasi pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi reformasi birokrasi dan penyelenggaraan informasi, dokumentasi, perpustakaan serta hubungan masyarakat;
6. pengelolaan urusan keuangan, pemantauan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan, persuratan, kearsipan, gaji dan tunjangan, rumah tangga dan pengelolaan BMN, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
7. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020

1.4. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Ringkasan Eksekutif
- II. Bab I Pendahuluan
- III. Bab II Perencanaan Kinerja
- IV. Bab III Akuntabilitas Kinerja
- V. Bab IV Penutup

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2020

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Untuk tahun 2020, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah memperjanjikan 1 Sasaran Strategis dan 9 target IKU dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target Setditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target |
|--|-------------------|---|--------|
| Tata Kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang Baik | 1 | Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | 30 |
| | 2 | Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Indeks) | 72 |
| | 3 | Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019 (persen) | 100 |
| | 4 | Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | 85 |
| | 5 | Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP DJPT (persen) | 100 |
| | 6 | Persentase unit Sekretariat DJPT yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen) | 82 |
| | 7 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah dilengkapi dan disampaikan (persen) | 60 |

| | | | |
|--|---|---|----|
| | 8 | Nilai IKPA Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap | 88 |
| | 9 | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | 85 |

2.2. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada periode berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU pada perspektif internal proses dan learning and growth sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. Indikator Kinerja dan Rencana Aksi Setditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | RENCANA AKSI |
|-------------------------|---|---|
| 1 | Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran dan evaluasi Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap • Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Tangkap dan Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan • Penataan Organisasi dan Tata Laksana Lingkup DJPT • Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) |
| 2 | Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks) | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan pemberian penghargaan pegawai penghitungan formasi kebutuhan jabatan fungsional p3t dan ap3t • Evaluasi penerapan disiplin dan kinerja pegawai • Penyusunan kurikulum diklat jabatan fungsional • Pelaksanaan kinerja pejabat fungsional lingkup ditjen perikanan tangkap • Pengelolaan sdm aparatur dit. PSDI • Pengelolaan sdm aparatur dit PDK • Penyelenggaraan tata usaha sdm aparatur direktorat pelabuhan perikanan • Penyusunan profile SDM Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap |
| 3 | Persentase penyelesaian temuan LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan) Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019 (persen) | <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pemeriksaan dan Penyelesaian Tindak Lanjut LHA/LHP dan instansi terkait-DIT KAPI |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | RENCANA AKSI |
|-------------------------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi. penyelesaian dan tindak lanjut SPIP dan laporan hasil audit lingkup DJPT • Penyelesaian tindak lanjut aset bermasalah • Rapat penyempurnaan data master aset dan wasdal bmn pada sistem informasi manajemen aset negara (SIMAN) • Pengelolaan BMN satker pusat • Tindak lanjut proses penetapan status penggunaan BMN • Perbaikan database SIMAK-BMN satker lingkup DJPT • Identifikasi dan inventarisasi BMN dalam rangka hibah aset ke dan dari daerah (UPT perintis) • Pendampingan penyusunan dokumen sumber dalam rangka penghapusan BMN • Inventarisasi dan pemetaan barang milik negara hasil kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun anggaran 2019 • Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Pengelolaan SDI • Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) Direktorat Pelabuhan Perikanan • Rapat Koordinasi Penataan Barang Milik Negara (BMN) di Direktorat Pelabuhan Perikanan |
| 4 | Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen Perikanan Tangkap 2020 • Perencanaan DAK 2020-2024 • Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif dan Definitif Ditjen Perikanan Tangkap TA. 2021 • Finalisasi RENSTRA Ditjen Perikanan Tangkap 2020-2024 • Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 serta Identifikasi Perencanaan 2021 • Koordinasi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Perikanan Tangkap (dilaksanakan di 6 lokasi) • Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dit. PSDI • Pelaksanaan perencanaan. program kegiatan dan anggaran satker Direktorat KAPI • Dukungan Pengelolaan Program Dit PDK • Perencanaan dan penganggaran Direktorat Pelabuhan Perikanan • Pengolahan Data untuk kebutuhan Organisasi Regional (RFMOs) • Pengolahan dan validasi data pendapatan nelayan penerima bantuan pemerintah |

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | RENCANA AKSI |
|-------------------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Data Statistik Perikanan Tangkap • Analisis Satu Data Perikanan Tangkap Tahun 2019 • Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 2020 • Pengelolaan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap • Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan • Penyusunan dan Evaluasi Laporan Kinerja Anggaran pada Direktorat Pengelolaan SDI • Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Pelaporan Program Direktorat Pelabuhan Perikanan • Monitoring dan Evaluasi kegiatan di Pelabuhan Perikanan Perintis |
| 5 | Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level) | <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi pelaksanaan pengendalian internal lingkup DJPT • SPIP Direktorat PDK • Evaluasi, penyelesaian dan tindak lanjut SPIP dan laporan hasil audit lingkup DJPT • Intensifikasi PNBK LINGKUP DJPT |
| 6 | Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen) | <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran dan evaluasi penerapan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar • Publikasi dan Penyebaran Informasi Kegiatan Prioritas DJPT • Fasilitasi Penguatan Kerja Sama Perikanan Tangkap Bilateral dan Regional • Fasilitasi Penguatan Kerja Sama Multilateral Bidang Perikanan Tangkap • Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga bidang Perikanan Tangkap |
| 7 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Setditjen Perikanan Tangkap yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen) | Pengukuran dan evaluasi rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap |
| 8 | Nilai IKPA Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | <ul style="list-style-type: none"> • Rekonsiliasi dan penyusunan pelaporan keuangan semester I TA. 2020 lingkup DJPT • Rekonsiliasi dan penyusunan pelaporan keuangan semester II TA. 2019 lingkup DJPT • Evaluasi penyesuaian belanja pegawai TA.2020 dan penyusunan belanja pegawai dan operasional TA.2021 lingkup DJPT • Penyusunan Laporan Keuangan Dit.PSDI • Verifikasi Pembayaran dan Penyelesaian Pekerjaan Kontraktual TA.2020-DIT KAPI • Pengelolaan Administrasi Keuangan Dit PDK • Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi dan Keuangan Direktorat Pelabuhan Perikanan |

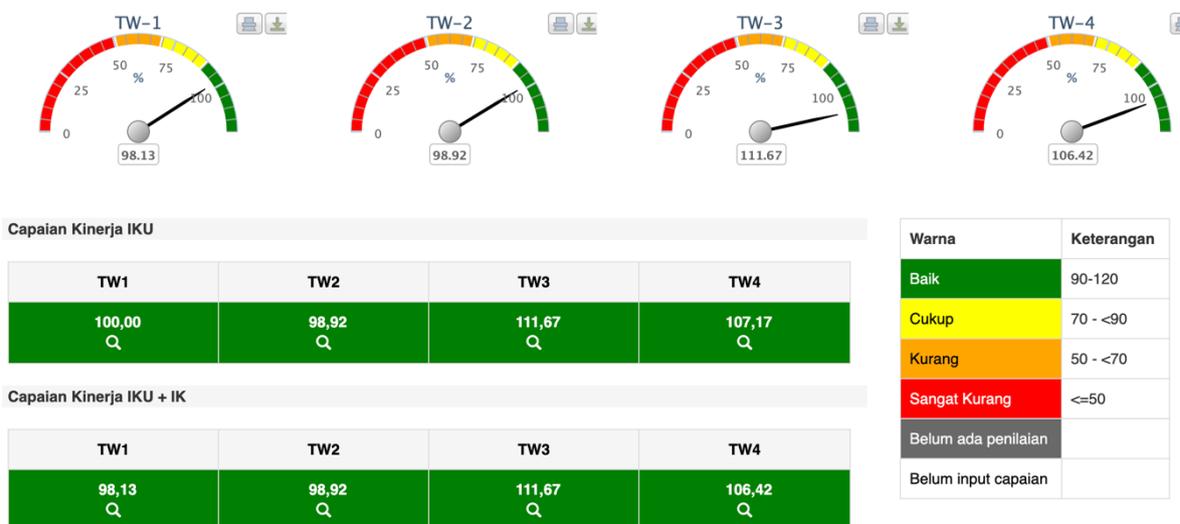
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | | RENCANA AKSI |
|-------------------------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Rapat penyempurnaan data master aset dan wasdal BMN pada sistem informasi manajemen aset negara (SIMAN) • Pengelolaan BMN satker pusat |
| 9 | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran dan evaluasi Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap • Implementasi Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup DJPT • Pengawasan Pelaksanaan Kearsipan Lingkup DJPT • Operasional Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan • Pengelolaan Arsip dan Persuratan Dit. PSDI • Operasional Perkantoran dan Ketatausahaan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan • Persuratan dan Kearsipan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan • Implementasi Standar Pelayanan Publik dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Dit PDK • Pengarsipan Dokumen Perizinan dan Penataan BMN Dit PDK • perasional Perkantoran dan Ketatausahaan Direktorat Pelabuhan Perikanan • Kegiatan Persuratan dan Kearsipan di Direktorat Pelabuhan Perikanan • Konsultasi publik rancangan PP tentang jenis dan tarif PNBP KKP • Integrasi penagihan dan pembayaran dalam pelaporan penerimaan PNBP UPT DJPT • Peningkatan kinerja dan percepatan pembangunan perikanan tangkap tahun 2020 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap • Pemantauan kinerja pelaksanaan keuangan dalam rangka optimalisasi pengelolaan sd perikanan tangkap • Kajian rumusan tarif PNBP sda perikanan berbasis produksi tangkapan ikan • Sosialisasi pengelolaan dan operasional perikanan tangkap dalam rangka penanggulangan dampak covid-19 • Rekonsiliasi PNBP Dit PDK • Evaluasi PNBP Dit PDK • Evaluasi Pelayanan Publik Penerapan ISO 9000:1 2015 Dit PDK • Layanan Sarana dan Prasarana Internal |

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yakni setiap bulan. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara Triwulan/semester/tahunan diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud. Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja Sekretariat Jenderal dilakukan oleh tim pengelola kinerja secara Triwulanan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Sekretariat Jenderal menggunakan aplikasi database online www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

Akuntabilitas Kinerja organisasi Setditjen Perikanan Tangkap merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Bagian di lingkungan Setditjen Perikanan Tangkap. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja tersebut di atas serta seluruh perjanjian kinerja di level Satuan Kerja, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Dalam pelaksanaannya, pengukuran dan pelaporan kinerja Setditjen Perikanan Tangkap menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), dengan tampilan *dashboard* capaian Sekretariat Jenderal Tahun 2020 seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Berdasarkan Gambar diatas Capaian Kinerja IKU sampai 2020 mencapai 107,17 dan capaian kinerja IKU+IK menapai 106,42. Berdasarkan capaian nilai tersebut Sekretariat Adapun capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | |
|----|--|-------------------|---|-----------|-------|--------|
| 1 | Tata Kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang Baik | 1 | Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | 30 | 32,32 | 107,73 |
| | | 2 | Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Indeks) | 72 | 70,34 | 97,69 |
| | | 3 | Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019 (persen) | 100 | 100 | 100,00 |
| | | 4 | Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | 85 | 90,64 | 106,64 |
| | | 5 | Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP DJPT (persen) | 100 | 100 | 100,00 |
| | | 6 | Persentase unit Sekretariat DJPT yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen) | 82 | 100 | 121,95 |
| | | 7 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah dilengkapi dan disampaikan (persen) | 60 | 79,06 | 131,18 |
| | | 8 | Nilai IKPA Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap | 88 | 95,96 | 109,05 |
| | | 9 | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | 85 | 86,24 | 101,46 |

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan indikator kinerja untuk setiap Perspektif sebagai berikut :

3.2.1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Perikanan Tangkap sebagaimana yang telah diatur oleh Kemenpan dan telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal KKP. Komponen penilaian terdiri atas 8 (delapan) area perubahan yakni sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan, dengan indikator penilaian : Tim RB, Roadmap RB, Pemantauan dan Evaluasi RB, Perubahan Pola Pikir dan budaya kinerja
2. Penataan Peraturan Perundang – undangan, dengan indikator penilaian :Harmonisasi dan Sistem Pengendalian dalam penyusunan perundang- undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi, dengan indikator penilaian :Evaluasi dan Penataan
4. Penataan Tata Laksana, dengan indikator penilaian :Proses bisnis dan SOP kegiatan utama, E-Government, Keterbukaan Informasi Publik
5. Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia, dengan indikator penilaian: Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Promosi jabatan dilakukan secara terbuka, Penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, Pelaksanaan evaluasi jabatan, Sistem informasi Kepegawaian.
6. Penguatan Akuntabilitas, dengan indikator penilaian :Keterlibatan pimpinan, Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.
7. Penguatan Pengawasan, dengan indikator penilaian :Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pembangunan Zona Integritas, APIP.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian :Standar pelayanan, Budaya pelayanan prima, Pengelolaan pengaduan dan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, Pemanfaatan teknologi Informasi.

Penilaian Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPT merupakan nilai yang diperoleh dari proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara internal dengan Inspektorat Jenderal selaku evaluator. Penilaian ini dilakukan terhadap pelaksanaan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi. Target indikator nilai kinerja reformasi birokrasi DJPT pada 2020

adalah 30. sedangkan sampai dengan akhir tahun 2020 telah didapatkan capaian PMPRB 32,32 atau 107,73%.

Tabel 4. Capaian IKU “Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020

| Nama IKU | Target | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian |
|--|--------|----------------------|-----------|
| Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Perikanan Tangkap | 30 | 32,32 | 107,73 % |

Penilaian Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPT merupakan nilai yang diperoleh dari proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara internal dengan Inspektorat Jenderal selaku evaluator. Penilaian ini dilakukan terhadap pelaksanaan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi. Target indikator nilai kinerja reformasi birokrasi DJPT pada 2020 adalah 30 (kategori A/Memuaskan). Sesuai dengan hasil reviu terhadap kertas kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Perikanan Tangkap, maka diperoleh kesepakatan nilai PMPRB DJPT sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020

| No | Area | Pemenuhan | | Reform | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------------------|--------|------------------------|
| | | Bobot | Nilai Hasil Pembahasan | Bobot | Nilai Hasil Pembahasan |
| 1 | Manajemen Perubahan | 2,00 | 1,71 | 3,00 | 1,89 |
| 2 | Deregulasi Kebijakan | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | Penataan dan Penguatan Organisasi | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 |
| 4 | Penataan Tatalaksana | 1,00 | 0,89 | 3,75 | 3,75 |
| 5 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 1,40 | 1,37 | 2,00 | 1,55 |
| 6 | Penguatan Akuntabilitas | 2,50 | 2,25 | 3,75 | 3,37 |
| 7 | Penguatan Pengawasan | 2,50 | 1,99 | 1,95 | 1,95 |
| 8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 2,50 | 2,25 | 3,75 | 2,86 |
| Nilai | | 16,60 | 13,46 | 21,70 | 18,86 |
| Nilai Reform | | 32,32 | | | |

Beberapa permasalahan umum yang sering terjadi lain dalam pencapaian indikator ini berdasarkan antara lain: (1) pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi; (2) Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan masyarakat; (3) Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai *quality*

assurance; (4) Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum optimal; (5) Praktik manajemen SDM belum optimal meningkatkan profesionalisme.

Oleh karena itu, beberapa langkah dan strategi yang perlu dilakukan di DJPT adalah sebagai berikut:

1. Komitmen bersama, diawali dengan adanya komitmen pimpinan beserta seluruh jajaran, baik pusat maupun UPT.
2. Adanya semangat perubahan, terutama menyangkut pola pikir dan budaya kerja.
3. Konsistensi, bahwa RB sejatinya adalah perubahan yang terus menerus (*continuous improvement*) atau dalam operasional dikenal dengan metode Plan, Do, Check, Act (PDCA).
4. Ketersediaan anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi.
5. Adanya kerja sama di semua lini organisasi, sehingga ada rasa memiliki RB pada unit kerja kita.

3.2.2. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Indeks)

Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ini adalah Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPT. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Sedangkan dimensi kompetensi merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus. Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin. Pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP.

Tabel 6. Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Indeks)” Tahun 2020

| Nama IKU | Target | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian |
|---|--------|----------------------|-----------|
| Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Indeks) | 72 | 70,34 | 97,69 |

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPT tahun 2020 adalah sebesar 68,25 dengan capaian nilai per dimensi yaitu dimensi disiplin (bobot 5) sebesar 4,93, dimensi kinerja (bobot 30) sebesar 24,72, dimensi kompetensi (bobot 40) sebesar 26,80 dan dimensi kualifikasi (bobot 25) sebesar 11,79. Capaian tahun 2020 masih di bawah target, yaitu sebesar 72 dan juga capaian ini mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, terutama dari dimensi kompetensi. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa ASN yang belum mengumpulkan data dukung dimensi kompetensi walau sebenarnya telah mengikuti beberapa kegiatan pengembangan kompetensi dan memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/kursus.

Capaian IP ASN diukur secara tahunan. Selama tahun 2020 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Melakukan identifikasi bagi pegawai yang membutuhkan pelatihan dan tambahan ketrampilan sesuai dengan deskripsi pekerjaan serta mengusulkan untuk pelatihan dan peningkatan ketrampilan bagi yang bersangkutan.
2. Meningkatkan kompetensi dengan sosialisasi peraturan-peraturan terkait kepegawaian.
3. Pelatihan bagi pegawai dengan fokus pelatihan pada aspek-aspek yang masih rendah bagi pegawai yang bersangkutan.
4. Monitoring dan evaluasi presensi.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian IKU ini salah satunya adalah terkait sisi pemutakhiran database kepegawaian. Dimana masih banyak data yang belum diperbaharui secara berkala oleh pengelola aplikasi kepegawaian Sistem Kepegawaian (SIMPEG) online KKP. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah dari dimensi kompetensi. Dimana masih banyak pejabat struktural yang belum melaksanakan diklatpim sesuai levelnya, diklat teknis 20 Jam Pelajaran (JP) dan seminar serta untuk staf pun masih banyak yang belum melaksanakan diklat 20 JP dan mengikuti seminar. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah

dilakukan di antaranya dengan terus melakukan updating secara berkala, koordinasi dan bimtek updating data SIMPEG, serta mengembangkan aplikasi SIMPEG secara lebih user friendly. Sedangkan dari dimensi kompetensi, upaya koordinasi telah dilakukan dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP untuk merencanakan pelatihan bagi pegawai KKP, diklat pelatihan dan pendidikan bagian pegawai.

3.2.3. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019 (persen)

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPT dibandingkan realisasi anggaran TA. 2019 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan TA. 2019 (audit) tidak melebihi 1%. Hasil evaluasi terhadap penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019 Ditjen Perikanan Tangkap telah menyelesaikan 100% dr temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap.

Tabel 7. Capaian IKU “Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019 (persen)” Tahun 2020

| Nama IKU | Target | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian |
|---|---------------|-----------------------------|------------------|
| Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019 (persen) | 100 | 100 | 100,00 |

3.2.4. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Indikator tersebut merupakan kegiatan penilaian rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap terhadap Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus

peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Rekonsiliasi dimaksud dilakukan atas komponen-komponen kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Target indikator nilai AKIP DJPT pada 2020 adalah 85 (kategori A/ Memuaskan). Realisasi capaian Nilai PMSAKIP adalah 90,64 atau 106,64% dari target. Penilaian mandiri dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal bersama tim sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

Tabel 8. Capaian IKU “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020

| Nama IKU | Target | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian |
|---|--------|----------------------|-----------|
| Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap | 85 | 90,64 | 106,64% |

Rencana aksi untuk meningkatkan Nilai Kinerja pada tahun yang akan datang, yaitu:

1. Melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
2. Meningkatkan peran serta UPT Pusat dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPT;
3. Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak;
4. Penyelarasan data dan informasi terkait dengan target atau capaian pada aplikasi kinerja dengan Renstra ataupun Renja sehingga dapat memberikan informasi yang lebih valid;
5. Implementasi dari rencana aksi terhadap target-target yang tidak tercapai.

3.2.5. Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP DJPT (persen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara

menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Penilaian Indikator Nilai Maturitas SPIP DJPT terbagi dalam enam tingkatan, yaitu Level 0 (Belum Ada), Level 1 (Rintisan), Level 2 (Berkembang), Level 3 (Terdefinisi), Level 4 (Terkelola dan Terukur), dan Level 5 (Optimum). Sampai dengan akhir tahun 2020, Tim SPIP Ditjen Perikanan Tangkap telah mampu memenuhi seluruh dokumen yang harus disiapkan untuk maturitas SPIP sehingga capaiannya adalah 100%.

Tabel 9. Capaian IKU “Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP DJPT (persen)” Tahun 2020

| Nama IKU | Target | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian |
|---|--------|----------------------|-----------|
| Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP DJPT (persen) | 100 | 100 | 100,00 |

Pada tahun 2020, pencapaian nilai Maturitas SPIP mengalami kenaikan yaitu 3,499 (level 3/terdefinisi) di tahun 2019 menjadi 4,410 (level 4/ terkelola dan terukur) di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa DJPT telah melakukan perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, serta hal tersebut menunjukkan bahwa:

1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan Kementerian.
2. Evaluasi formal dan terdokumentasi, namun sebagian besar evaluasi dilakukan secara manual dan belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer.

3.2.6. Persentase unit Sekretariat DJPT yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi,

menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level 1-2 yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih (aplikasi Bitrix24).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Tabel 10. Capaian IKU “Persentase unit Sekretariat DJPT yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” Tahun 2020

| Nama IKU | Target | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian |
|--|--------|----------------------|-----------|
| Persentase unit Sekretariat DJPT yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen) | 82 | 100 | 120,00 |

Pada tabel terlihat bahwa realisasi Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar lingkup Sekretariat DJPT tahun 2020 sebesar 120,00%, hal ini menunjukkan bahwa capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 82%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 18,72% yang disebabkan karena sebagian besar pejabat di level 3 dan 4 serta staf telah tergabung dalam aplikasi Bitrix dan aktif dalam sharing informasi.

3.2.7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah dilengkapi dan disampaikan (persen)

Yang dimaksud dengan persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikan Tangkap adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada

Triwulan IV Tahun 2019 s.d. Triwulan III Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon 1.

Tabel 11.Capaian IKU “Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” Tahun 2020

| Nama IKU | Target | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian |
|--|--------|----------------------|-----------|
| Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen) | 60 | 79,06 | 131,77% |

Realisasi persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2020 ini mencapai 79,06 atau 131,77% dari target 60. Angka ini didapat dari perhitungan total temuan awal sebanyak 191 rekomendasi dan telah dilakukan tindak lanjut (tuntas) 151 rekomendasi sehingga sisa rekomendasi adalah sebesar 40 rekomendasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dalam melakukan tindak lanjut (tuntas) rekomendasi, DJPT telah mengalami peningkatan sebesar 9,68%. Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti secara tepat waktu, melalui:

1. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lingkup Sekretariat dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindaklanjut rekomendasi yang disampaikan sampai tuntas.
2. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.

3.2.8. Nilai IKPA Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka

perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L.

Tabel 12. Capaian IKU “Nilai IKPA Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020

| Nama IKU | Target | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian |
|---|--------|----------------------|-----------|
| Nilai IKPA Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap | 88 | 95,96 | 109,05 % |

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2020 masuk dalam kategori baik, yaitu sebesar 95,96 atau 109,05%. Untuk meningkatkan nilai IKPA, evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran terhadap satker Setditjen Ditjen Perikanan Tangkap perlu dilakukan peningkatan sepanjang tahun periode anggaran berjalan. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui : (i) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (ii) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (iii) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Selanjutnya, satker Setditjen Ditjen Perikanan Tangkap terus dikomunikasikan intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap Triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian output yang benar- benar optimal.

3.2.9. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap

Nilai kinerja anggaran merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun aspek yang dinilai adalah aspek implementasi yang terdiri atas 4 (empat) komponen yakni (1) Penyerapan Anggaran (P) dengan bobot 9,7 persen,

(2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (K) dengan bobot 18,2 persen, (3) Pencapaian keluaran (PK) dengan bobot 43,5 persen dan Efisiensi (E) dengan bobot 28,6 persen. Adapun pengelompokan hasil penilaian adalah sebagai berikut :

- Nilai Kinerja Anggaran >90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran >80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
- Nilai Kinerja Anggaran >50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang;
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang;

Tabel 13. Capaian IKU “Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2020

| Nama IKU | Target | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian |
|---|--------|----------------------|-----------|
| Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap | 85 | 86,24 | 101,46 |

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada realisasi keempat komponen yang dicantumkan pada dashboard aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Realisasi nilai kinerja anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 adalah sebesar 86,24% dengan kategori baik dari target 85,00 yang ditetapkan atau diatas target sebesar 108,26%.

Beberapa kendala dalam pengisian aplikasi SMART, yaitu:

1. Operator belum memahami cara pengisian sesuai Juknis pengisian aplikasi SMART;
2. Operator tidak mendapatkan data dalam pengisian capaian Realisasi Volume Keluaran;
3. Terdapat pengisian berulang sehingga terjadi akumulasi capaian;
4. Realisasi Indikator eluaran Kegiatan belum diinput hal ini mempengaruhi capaian Nilai Kinerja Satker dan DJPT;
5. Setiap tahun selalu ada pergantian operator yang tidak dilatih oleh operator sebelumnya; dan
6. Belum seluruh kegiatan telah dilaksanakan sehingga minim capaian output.

3.3 Kinerja Anggaran

Setditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.125.628.331.000,- atau naik sebesar Rp. 5.303.775.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2019 (naik 4,2%). Pagu alokasi anggaran tahun 2020 tersebut Rp. 47.162.711.000,- digunakan untuk

belanja pegawai, Rp. 66.580.978.000,- untuk belanja barang dan Rp. 11.884.642.000,- untuk belanja modal. Realisasi anggaran sampai akhir tahun 2020 ini terealisasi sebesar Rp. 121.757.967.703,- atau mencapai 96,92 %.

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia.

Sasaran Setrategis Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah “Tata Kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik” dengan capaian nilai sasaran strategis 106,42%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggarannya yang mencapai 96,92% artinya penggunaan sumber daya anggaran telah digunakan secara efisien dengan memperoleh capaian sasaran strategis 106,42%

BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis tahun 2020 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal. Sampai akhir tahun 2020, rata-rata pencapaian sasaran strategis Setitjen Perikanan Tangkap adalah sebesar 102,14% atau berkategori baik.

Untuk mencapai sasaran IKU berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja utama. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota serta lembaga terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di seluruh Sekretariat Jenderal, unit kerja di lingkungan KKP serta stakeholder terkait.

Lampiran

Perjanjian Kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yuliadi**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. Zulficar Mochtar**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Juni 2020

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

M. Zulficar Mochtar

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap

Yuliadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|----|--|-------------------|--|--------|
| 1. | Tata kelola Ditjen Perikanan Tangkap yang baik | 1 | Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | 30 |
| | | 2 | Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks) | 72 |
| | | 3 | Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2019 | 100 |
| | | 4 | Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | 85 |
| | | 5 | Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (persen) | 100 |
| | | 6 | Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen) | 82 |
| | | 7 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen) | 60 |
| | | 8 | Nilai IKPA Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | 88 |
| | | 9 | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | 85 |

Kegiatan : **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**
Jumlah Anggaran Tahun 2020 : **Rp. 126.481.083.000,-**

Jakarta, 30 Juni 2020

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



M. Zulficar Mochtar

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Yulladi